

DAFTAR PUSTAKA

➤ Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN, 2012.
- _____. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- _____. *Konstitusi & Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- _____. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020.
- _____. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. *Buku Panduan Tugas Akhir*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Harijanti, Susi, et. al. *Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Mubdi, Umar et al. *Mewujudkan Partisipasi Bermakna: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 54/PUUXXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, 2023
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rosidin, Utang dan Rusdiana. *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018.
- Soeprapto, Maria Farida Indarti. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

➤ **Jurnal**

Ambarsari, Retno. "Hukum Acara dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia". *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Mei 2022, Vol. 2 No. 5.

Amin, Rizal Irvan, dkk. "Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent)". *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020.

Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 9, Nomor 1, April 2020.

Anggraeni, Ricca dan Cipta Indra Lestari Rachman. "Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?". *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*. Vol. 140, Mei 2020.

Busyroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". *Arena Hukum*. Volume 10, No. 2, Agustus 2017.

Effendi, Syafnil. "Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah". *Humanus*. Vol. X No.1 Th. 2011.

Gilbert, Michael D. "Judicial Independence and Social Welfare". *Michigan Law Review*. Vol. 112, Issue 4, 2014.

Hayati, Nyoman Nidia Sari dan Sri Warjiyati Muwahid. "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 16, No. 1 (2021).

Jalaludin. "Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang Baik". *Jurnal Aktualita*. Volume 6 Nomor 3, 2011.

M. Laica Marzuki. "Konstitusi dan Konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi*. Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.

- Mamahit, Angel Jeaned'arc Sofia. "Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945". *Lex Administratum*. Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014.
- Nggilu Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 16. Nomor 1. Maret 2019.
- Putra, Antoni. "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013". *Jurnal Yudisial*. Vol. 14 No. 3 Desember 2021.
- Qamar, Nurul. "Independence of Judges in The Implementation Powers of Justice". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 15 No. 1, January 2015.
- _____. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. I, No. 1, November 2012.
- Riwanto, Agus. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila". *Jurnal Al-Ahkam*. Volume 2, Nomor 2, 2017.
- See, Harold. "Comment Yudicial Selection and Decrisional Independence". *Law and Contemporary Problems*. Vol. 61, No 3, Summer 1998.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 7, Nomor 3, Desember 2018.
- Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" Dalam Penerbitan Perppu". *Mimbar Hukum*. Volume 22, Nomor 1, Februari 2010.
- Sofiani, Triana. "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama". *Jurnal Penelitian*. Volume 7, Nomor 2, November 2010.
- Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Masalah - Masalah Hukum*. Jilid 45 No. 2, April 2016.
- Supena, Cecep Cahya. "Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Volume 9, Nomor 2, Mei 2023.

Wibowo, Agung Prastyo. "Lembaga Eksaminasi Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia Upaya Pengujian Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 15, No. 1. Maret 2012.

Windarawan, Puguh. "Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke Arah Constitutional Heavy". *Jurnal Konstitusi*. Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.

➤ **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

➤ **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

➤ **Website**

DPR-RI. 2023. "DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang". [<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720/t/DPR%20RI%20Setujui%20RUU%20Perppu%20Ciptaker%20Jadi%20Undang-Undang>]. Diakses pada 07-10-2023, pukul 10.10.

Gaffar, Janedjri M. 2009. "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf]. Diakses pada 22-11-2023, pukul 10.00.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2018. Database Peraturan. [<https://peraturan.go.id/>]. Diakses pada 09-11-2023, pukul 09.30.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2023. "Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014". [<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi->

[tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014](#)]. Diakses pada 12-02-2024, pukul 09.00.

Kominfo. 2021. “*Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja*”. [<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32840/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja/0/berita>]. Diakses pada 13-02-2024, pukul 09.14.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2021. “*MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*”. [<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>]. Diakses pada 07-10-2023, pukul 07.25.

. 2023. “*Tolak Uji Formil, Uji Materiil UU Cipta Kerja Dilanjutkan*”. [<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19605&menu=2>]. Diakses pada 07-10-2023, pukul 11.36.

Rahardjo, Mudjia. 2010. “*Mengenal Lebih Jauh tentang Studi Kasus*”. [[https://uin-\[malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html](https://uin-[malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html)]. Diakses pada 02-03-2024, pukul 09.48.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2022. “*Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja*”. [<https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>]. Diakses pada 07-10-2023, pukul 10.00.

Sokonagoro, Rahmat S. 2012. “*Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan*”. [<https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/50>]. Diakses pada 02-03-2024, pukul 08.21.